



Judul : Masyarakat Butuh Pemerataan Ekonomi
Tanggal : Minggu, 14 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Masyarakat Butuh Pemerataan Ekonomi

BANTUAN sosial (bansos) dinilai perlu dilanjutkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Bansos juga diperlukan sebagai salah satu cara menstabilkan perekonomian.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengatakan, untuk negara berkembang seperti Indonesia yang masih membutuhkan pemerataan ekonomi, bansos masih diperlukan sebagai perlindungan sosial untuk masyarakat kelas bawah.

Fathan bilang, bansos memiliki pengaruh terhadap daya beli masyarakat, apalagi anggaran bansos 2024 yang disiapkan cukup besar.

Misalnya untuk bantuan langsung tunai (BLT) El Nino penrimanya sekitar 18 juta dengan besaran 400 ribu/KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta KPM, bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bansos lainnya.

"Saya kira bansos itu akan berpengaruh meningkatkan daya beli, atau setidaknya mampu menjaga ketahanan daya beli masyarakat bawah," kata Fathan kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (12/1/2024).

Dalam pandangannya, kestabilan ekonomi sebuah negara tentunya memiliki banyak faktor. Seperti, faktor ekonomi global, kondisi sosial politik dalam negeri dan lainnya.

"Saya kira bansos bagian dari banyak faktor dan sebagai upaya Pemerintah menstabilkan ekonomi," ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, hubungan bansos, daya beli masyarakat dan perekonomian negara. Menurutnya, konsep dasar bansos adalah perlindungan sosial.

Fathan menyebut, bansos bentuk kebutuhan dasar manusia un-

tuk menjaga ketahanan diri dan keluarga, untuk turut merasakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial.

Hal ini diwujudkan seperti BPNT yang ditujukan untuk masyarakat dengan kondisi 25 persen terendah, PKH yang ditujukan untuk 10 juta masyarakat miskin, atau BLT El Nino di tengah situasi iklim yg tidak menentu.

Fathan mengakui, anggaran bansos menjadi incaran para koruptor. Karena itu, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Supaya penyaluran bansos tepat sasaran.

Sinergi berbagai pihak menjadi kunci untuk melaksanakan bansos dengan baik, dari hulu sampai hilir. Dimulai dari validasi dan verifikasi pendataan penerima manfaat, pengawasan dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, koordinasi dengan aparat pengawas dan penegak hukum.

"Dan membuka atau menerima aduan masyarakat dengan baik," terangnya.

Dia menyarankan, tak hanya bansos pangan. Pemerintah juga harus fokus membuat bansos produktif. Karena, selama ini bansos lebih bersifat konsumtif, bagaimana agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan ultra mikro mendapatkan perlindungan dan dukungan usaha dari pemerintah.

"Kalau usaha UMKM dan ultra mikro yang merupakan habitat masyarakat bawah dijalankan, itu mampu bergeliat dan berhasil, saya kira daya beli masyarakat otomatis akan terangkat dengan sendirinya," kata Fathan.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mewanti-wanti kepada Pemerintah agar penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran. ■ IR

